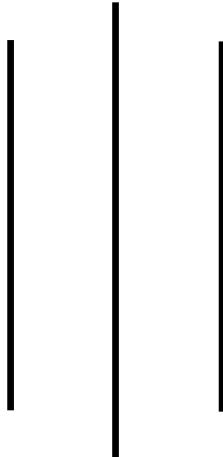




**LAPORAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2024**



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA**

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 55 LIMA PULUH - 21255

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Organisasi	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Landasan Hukum	2
3. Maksud dan Tujuan	3
4. Stuktur Organisasi	4
5. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
6. Sumber Daya	6
7. Strategi dan Kebijakan.....	9
8. Isu-isu Strategis	11
B. Sistematika Penyusunan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENSTRA.....	14
B. Indikator Kinerja Utama	17
C. Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
B. Realisasi Anggaran.....	41
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan	37
2. Langkah-Langkah Strategis	37

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sebagai respon terhadap tuntutan adanya perubahan dalam Manajemen pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara menyusun Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini bermaksud untuk memberikan informasi terkait capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, dan hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan di tahun berikutnya

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan setiap tahunnya dapat dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu Kami mohon saran dan pendapat untuk penyempurnaan pembuatan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 untuk masa yang akan datang, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Lima Puluh, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA



Dr. MELINDA SURYANTI LUBIS, S.STP, M.AP
PEMBINA TK. I /IV.B
NIP. 198705262006022002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan, dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui rencana kinerja dan perjanjian kinerja serta melaporkan akuntabilitas pelaksanaan kinerjanya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan Penetapan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara merupakan perubahan Nomenklatur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan

Dengan keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dalam memberikan Pelayanan dibidang Investasi dan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara akan berusaha ikut membantu tata kelola ekonomi daerah dengan meningkatkan efisiensi pengurusan izin yang akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan dunia usaha di Kabupaten Batu Bara. Memberikan kemudahan kepada masyarakat, pelaku usaha dalam hal pelayanan investasi maupun pelayanan perizinan dan non perizinan, diharapkan dapat menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Batu Bara.

2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara dilandasi beberapa dasar hukum, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Revisi atas Laporan Kinerja (LKJ) Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akutanbilitas Kinerja Instasi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

Kabupaten Batu Bara;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
15. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
16. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 109 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara
17. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.

3. Maksud dan Tujuan

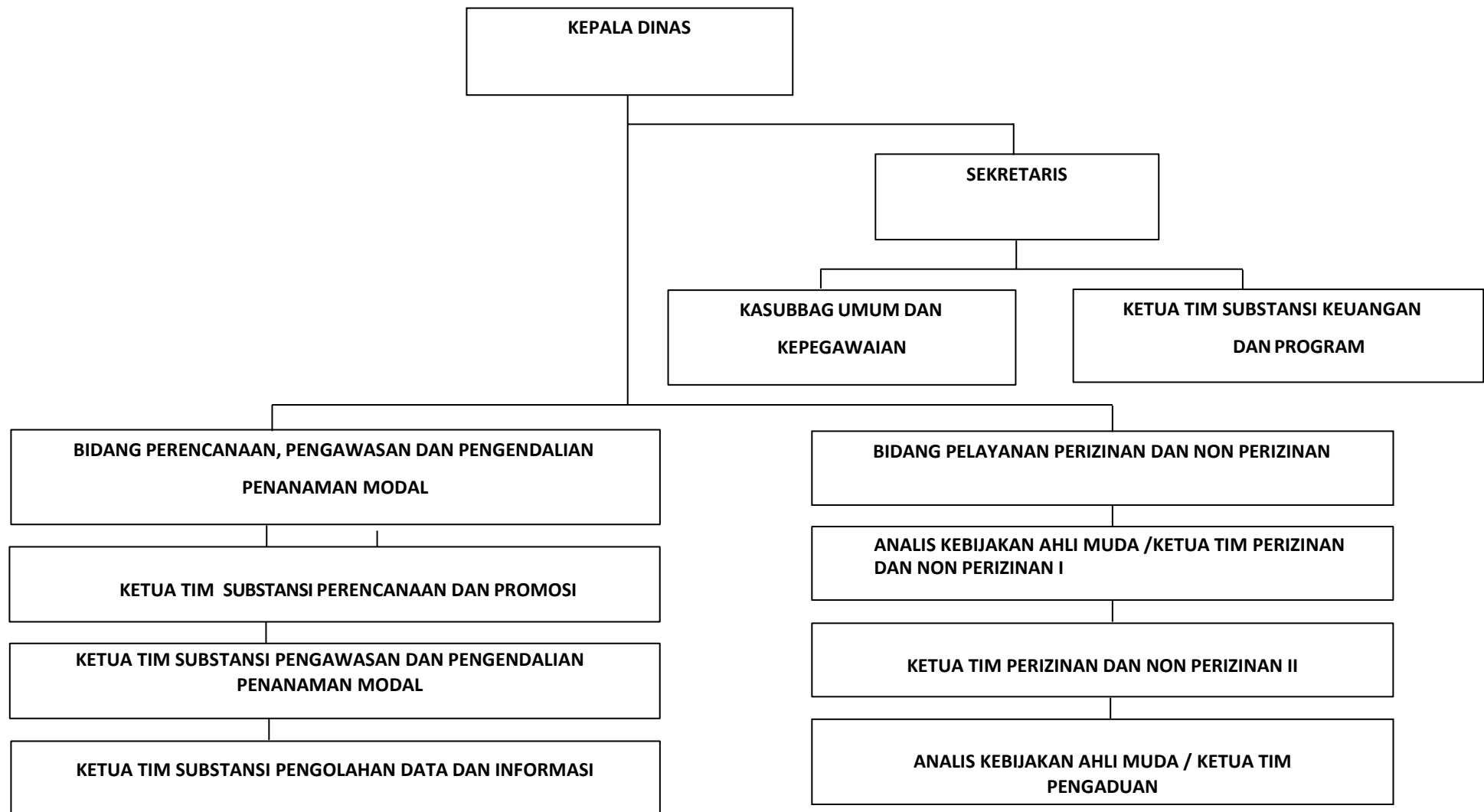
Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara tahun 2024 dalam upaya memperbaiki kinerja pada tahun berikutnya;
3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang

4. Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara merupakan perubahan Nomenklatur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, dengan susunan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu **Tipe B**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan unit pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



5. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan investasi, promosi, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam penyusunan pengembangan investasi, promosi, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian;
3. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
4. pelaksanaan tugas pembantuan pemerintah dibidang penanaman modal dan perizinan;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

6. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara membutuhkan sumber daya dalam menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan yaitu SDM dan sarana prasarana. Kondisi saat ini sumber daya pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

a.	Kepala Dinas	:	1	Orang
b.	Sekretariat	:		Orang
	– Sekretaris		1	Orang
	– Kasubbag Umum dan Kepegawaian		1	Orang
	– Pengelola Sarana dan Prasarana		1	Orang
	– Tenaga Kerja Sukarela (TKS)		4	Orang
	– Ketua Tim Substansi Keuangan dan Program		1	Orang
	– Bendahara		2	Orang
	– Tenaga Kerja Sukarela (TKS)		5	Orang
c.	Bidang Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal			Orang
	– Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal		1	Orang
	– Ketua Tim Substansi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal		1	Orang
	– Ketua Tim Substansi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal		1	Orang
	– Ketua Substansi Pengolahan Data dan Informasi		1	Orang
	– Analis Kebijakan Ahli Muda (JFT)			Orang
	– Analis Dokumen Perizinan		1	Orang
	– Tenaga Kerja Sukarela (TKS)		5	Orang
d.	Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan			Orang
	– Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan		1	Orang
	– Ketua Tim Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I		1	Orang

	– Ketua Tim Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II	1	Orang
	– Ketua Tim Substansi Pengaduan	1	Orang
	– Analis Dokumen Perizinan	1	Orang
	– Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	7	Orang
	– Tenaga IT	2	Orang

Komposisi Pegawai

a. Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1.	Eselon II	1	
2.	Eselon III	2	
3.	Eselon III / JFT	1	
1.	Eselon IV	1	
2.	Ketua Tim	4	
3.	JFT / Ketua Tim	3	
4.	JFT	1	
5.	Staf	2	
6.	TKS	20	
7.	Tenaga IT	2	

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1.	SLTA	10	1 orang PNS, 9 orang TKS
2.	D1	1	1 orang IT
3.	D3	5	3 orang PNS, 2 orang TKS
4.	S1	9	9 orang PNS, 10 orang TKS
5.	S2	2	2 orang PNS
6.	S3	1	1 orang PNS

c. Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Golongan IV	1 Orang	
2.	Golongan III	13 Orang	
3.	Golongan II	2 Orang	
4.	Golongan I	-	
5.	NonGolongan	22 Orang	TKS dan Tenaga IT
	Jumlah	38 Orang	16 orang PNS, 20 orang TKS dan 2 orang tenaga IT

d. Berdasarkan Masa Kerja

NO	MASAKERJA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	0 tahun/d10 tahun	5 Orang	PNS
2.	11tahun s/d 15 tahun	7 Orang	PNS
3.	16tahun s/d 20 tahun	1 orang	PNS
4	21tahun s/d 25 tahun	orang	PNS
5	26tahun s/d 30 tahun	2 Orang	PNS
6.	31tahun s/d 40 tahun	1 Orang	PNS
	Jumlah	16 Orang	

e. Berdasarkan Jenis kelamin

NO	Jeniskelamin	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laki-laki	24 Orang	12 orang PNS, 12 orang TKS
2.	Perempuan	14 Orang	4 orang PNS, 10 TKS
	Jumlah	38 Orang	

Sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara yang diperoleh melalui pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan APBD Kabupaten Batu Bara untuk menunjang operasional pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Front Office – Back Office, Loker Penyerahan Permohonan Izin, Loker Pengaduan.
2. Penyebarluasan informasi melalui surat kabar, leaflet, papan informasi, dan rapat sosialisasi.
3. Gedung kantor yang dilengkapi dengan ruang pelayanan, ruang tunggu, TV, AC dan komputer, toilet, ruang empasi, ruang bermain anak, kursi roda dan jalan khusus penyandang cacat
4. Kendaraan roda empat 2 (dua) unit untuk Kepala Dinas dan Sekretaris, serta pengadaan mobil operasional pelayanan perizinan 1 (satu) unit

7. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya – upaya menyeluruh dan terintegrasi dan mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Adapun strategi yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Peningkatan nilai investasi PMDN dan PMA
- b. Peningkatan kualitas pelayanan perizina di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu
- c. Peningkatan kualitas dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait izin
- d. Peningkatan manajemen kinerja sesuai standart

b. Kebijakan

Kebijakan adalah keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kebijakan yang menggambarkan program dan langkah – langkah kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang telah ditetapkan. Adapun kebijakan dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara, yaitu:

Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Tercapainya Peningkatan Nilai Investasi Dearah	Meningkatnya Nilai Investasi daerah	Peningkatan Nilai Investasi PMDN dan PMA	Meningkatkan realisasi Penanaman Modal melalui kegiatan Bimbingan teknis/sosialisasi, dan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal
			Meningkatkan iklim Penanaman Modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal sehingga para pelaku usaha semakin produktif dalam mengembangkan Usahanya
			Meningkatkan daya tarik Penanaman Modal melalui Promosi yang terpadu dan efektif bagi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing yang berpijak pada peningkatan daya saing Penanaman Modal
2. Tercapainya Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan data terkait permohonan izin
			Penerbitan izin sesuai dengan prosedur
			Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman Modal
			Dibentuknya Tim Teknis Perizinan untuk

Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Memproses penyelesaian Surat Izin
		2. Peningkatan penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum serta pelayanan publik berbasis sistem teknologi informasi dan inovasi
			Mengadakan Sosialisasi Pengaduan Masyarakat
3. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Pengendalian terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja SKPD	Melaksanakan Pengendalian, evaluasi dan monitoring terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja SKPD

8. Isu – Isu Strategis

Adapun isu-isu strategis yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara adalah:

1. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten;
2. Pada satu sisi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan semakin tinggi pada sisi yang lain kemampuan anggaran sangat terbatas padahal dukungan anggaran sangat penting dalam keberhasilan suatu program dan kegiatan;
3. Tertib administrasi dan adanya kepastian hukum berusaha di bidang Penanaman Modal mendorong terciptanya iklim investasi di Kabupaten Batu Bara yang lebih kondusif;
4. Pengembangan promosi potensi investasi diharapkan dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Kabupaten Batu Bara ;
5. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dan pengembangan sarana prasarana pendukungnya.

B. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Dalam menyajikan Laporan Kinerja, Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Bab I – PENDAHULUAN

Menjabarkan latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, maksud dan tujuan penyusunan serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara. Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan yang sedang dihadapi organisasi

Bab II – PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan , menjelaskan secara ringkas gambaran umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.

Bab III – AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menjelaskan pencapaian kinerja menyeluruh dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- Membandingkan realisasi kinerja 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standard nasional
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja

Bab IV – PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Strategi

A. RENSTRA (RENCANA STRATEGI)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pedoman petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi Pemerintah adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Inpres dan Permen ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dikerangkakan dalam suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan amanat pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu untuk tahun 2024-2026.

1. Visi

Visi RPJPD Kabupaten Batu Bara 2005-2025 adalah ***“Kabupaten Batu Bara Sebagai daerah Industri, Perdagangan dan Jasa, Serta Pertanian Yang Beriman, Mandiri, Maju dan Sejahtera Berjaya”***.

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2005- 2025 tersebut, maka misi RPJPD Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, cerdas, kreatif dan produktif;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.
3. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing serta meningkatkan rasa aman masyarakat;

4. Mewujudkan Pelayanan Prasarana dan Sarana yang Memadai dan Berkualitas guna menunjang kegiatan ekonomi daerah;
5. Mewujudkan Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Asri dan Lestari;
6. Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan

Untuk mewujudkan visi Bupati tersebut dan sesuai dengan tujuan dan sasaran RPD 2024-2026, maka misi yang terkait terhadap tupoksi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara adalah Misi ke- 2 (satu) yaitu “ *Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih*” dan Misi ke -4 (empat) yaitu : “Mewujudkan Pelayanan Prasarana dan Sarana yang Memadai dan Berkualitas guna menunjang kegiatan ekonomi daerah”

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, maka upaya yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Menyediakan Sarana dan Prasarana yang memadai dalam rangka peningkatan Investasi dan Optimalisasi Pelayanan Perizinan.
2. Melaksanakan berbagai upaya pendidikan, pembinaan, dan pelatihan guna peningkatan kompetensi aparatur yang bertugas dibidang investasi dan pelayanan perizinan.
3. Membuat dan mengembangkan sistem informasi dan data yang berkaitan dengan peningkatan investasi dan optimalisasi pelayanan perizinan.
4. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan sosialisasi mengenai investasi dan pelayanan perizinan kepada seluruh stakeholder.
5. Menerapkan sistem birokrasi yang mudah, sederhana, dan berbiaya murah dalam rangka peningkatan investasi dan optimalisasi pelayanan perizinan.
6. Melakukan kegiatan promosi secara terukur dan tepat sasaran yang berkenaan dengan investasi dan optimalisasi pelayanan perizinan; dan
7. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang investasi dan pelayanan perizinan guna mendorong terciptanya iklim investasi dan layanan publik yang kondusif.

3. Tujuan dan Sasaran

Dalam laporan kinerja tahun 2024 ini menggambarkan tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) pada tahun 2024. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi kepala daerah yang didasarkan isu-isu strategis dan analisisstrategis.

Demikian sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Rincian hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
<i>Kabupaten Batu Bara Sebagai daerah Industri, Perdagangan dan Jasa, Serta Pertanian Yang Beriman, Mandiri, Maju dan Sejahtera Berjaya”.</i>	Misi 2: <i>Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih</i>	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi/ Penanaman Modal
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
	Misi 4: Mewujudkan Pelayanan Prasarana dan Sarana yang Memadai dan Berkualitas guna menunjang kegiatan ekonomi daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

Kabupaten Batu Bara telah menerbitkan Peraturan Bupati Batu Bara No. 109 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kabupaten Batu Bara. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Nilai Peningkatan Investasi (PMDN dan PMA)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Nilai AKIP OPD	Nilai AKIP OPD

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Perjanjian Kinerja pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian antara Kepala SKPD dengan Kepala Daerah dan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024 Sebagai wujud perjanjian kinerja antara Kepala SKPD dengan Kepala Daerah, Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh aparatur karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga seluruh kegiatan akan terarah dengan baik. Adapun penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Rupiah	53 Trilyun
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Nilai	85
3	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Nilai AKIP OPD	Nilai	BB

Program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam DPA adalah sebagai berikut :

Tabel Program dan Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.439.409.503	APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	271.222.912	APBD
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	55.800.000	APBD
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	604.104.000	DAK NF
	JUMLAH	4.370.536.415	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebelum masuk pada tahapan capaian kinerja, terlebih dahulu kami menjabarkan indikator Kinerja yang digunakan organisasi untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Pada tabel 3.1 berikut dapat dilihat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja DPMTSP TA. 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya investasi Daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Rupiah	500 Milyar	450.652.895.722	90,13
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Nilai	85	86,63	101,92
3	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai	BB (71)	BB (70,45)	BB (99,23)

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan yaitu : $(\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100 \%$

program/kegiatan dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran. Dalam hal ini akan kita evaluasi pencapaian kinerja tersebut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya investasi daerah

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Rupiah	500 Milyard	450.652.895.722	90,13

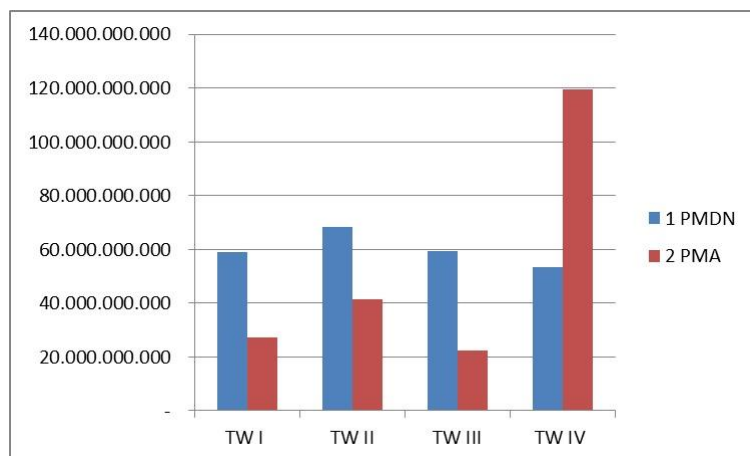
Realisasi investasi tahun 2024 yaitu Rp. 450.652.895.722,- (Enpat Ratus Lima Puluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah). Jika dilihat melalui target Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 sebesar 500 milyar rupiah, maka capaian realisasi investasi tahun 2024 sebesar 90,13%,

Perkembangan realisasi investasi penanaman modal tahun 2024 Kabupaten Batu Bara, sebagai berikut :

PERUSAHAAN	TRIWULAN I (Rp.)	TRIWULAN II (Rp.)	TRIWULAN III (Rp.)	TRIWULAN IV (Rp.)	JUMLAH
PMDN	58.995.492.510	68.476.956.653	59.416.017.356	53.373.223.583	240.261.690.102
PMA	27.296.789.726	41.390.497.115	22.367.108.590	119.336.810.189	210.391.205.620
Jumlah realisasi investasi PMDN DAN PMA					450.652.895.722

Sumber data : PMDN dan PMA pada LKPM Tahun 2024 yang disampaikan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan tautan <https://oss.go.id> (menu Pelaporan > Laporan LKPM).

Grafik perkembangan realisasi investasi penanaman modal (PMDN dan PMA) tahun 2024 di Kabupaten Batu Bara, sebagai berikut :



Pada tahun 2024 realisasi Investasi di Kabupaten Batu Bara sebesar Rp. 450.652.895.722, Realisasi investasi diperoleh dari 36 perusahaan (PMDN dan PMA) yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) tahun 2024 melalui Sistem OSS (Online Single Submission).

Perbandingan realisasi dan capaian investasi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut :

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun2024		
			Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Rupiah	1 Trilyun	668.037.940.000	66,80	500 Milyard	450.652.895.722	90,13

Realisasi Investasi di tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan tidak ada penanaman modal (PMDN/PMA) dengan skala besar atau investor yang baru di Kabupaten Batu Bara Nilai investasi diperoleh dari perusahaan PMDN dan PMA yang existing. Melihat realisasi investasi tahun 2023 yang tidak mencapai target, maka untuk tahun 2024 target investasi diturunkan menjadi 500 Milyard rupiah, sehingga capaian realisasi investasi tahun 2024 mencapai 90,13% dan dikategorikan tidak mencapai target

Pencapaian kinerja persentase Nilai Investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) didukung dengan adanya pelaksanaan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan rincian realisasi kinerja dan anggaran sebagai berikut :

Realisasi Program/Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Persentase
Nilai Investasi PMDN dan PMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARA N (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Program Pengendalian Iklim Penanaman Modal	271.222.912	268.672.350	99,06	Meningkatnya iklim penanaman modal
1.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	271.222.912	268.672.350	99,06	Tersedianya peta potensi investasi sektor indsutri
1)	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	271.222.912	268.672.350	99,06	Kajian peta potensi investasi sektor industri
II.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	604.104.000	599.503.700	99,24	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	604.104.000	599.503.700	99,24	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan penanaman modal
1)	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	494.904.000	492.603.700	99,54	384 Pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis
2)	Pengawasan Penanaman Modal	109.200.000	106.900.000	97,89	28 kegiatan usaha yang dilakukan pengawasan
	JUMLAH	875.326.912	868.176.050	99,18	

Selanjutnya berdasarkan hasil capaian kinerja dan realisasi program/kegiatan penunjang capaian indikator tersebut, maka dapat dihitung analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Adapun rumus perhitungan efisiensi sumber daya atas kinerja yang dihasilkan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Adapun Efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja persentase Nilai Investasi PMDN dan PMA terhadap realisasi anggaran program pengendalian iklim penanaman modal dan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, sebagai berikut :

	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1.	Meningkatnya investasi Daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA	500.000.000	450.652.895.722	90,13	875.326.912	868.176.050	99,18	0,89%

Adapun yang menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja persentase Nilai Investasi PMDN dan PMA tidak memenuhi target, hal ini disebabkan :

1. Belum optimalnya Perusahaan PMDN dan PMA dalam menyampaikan LKPM, sehingga investasinya tidak tercatat secara keseluruhan.
2. Tidak ada penambahan penanaman modal (PMDN/PMA) dengan skala besar atau investor yang baru Tahun 2024 di Kabupaten Batu Bara
3. Belum terbukanya Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT)
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan investasi dan pelayanan

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian target kinerja tersebut, yaitu :

1. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha (PMDN dan PMA) di Kabupaten Batu Bara terkait penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
3. Menyusun Peta Potensi investasi Kabupaten Batu Bara
4. Menyusun Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID)
5. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha di Kabupaten Batu Bara

DATA PERUSAHAAN YANG MELAPORKAN NILAI INVESTASI TAHUN 2024

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Nilai Investasi (Rp.)	Status
1.	ARYA RAMA PERSADA	Dusun XII Small Holder, Desa Perjuangan, kec. Sei Balai, Kab. Batu Bara	9.433.782.550	PMDN
2.	BAGASTA ABADI SENTOSA	Jalan Raya Medan-Kisaran km 110, Desa Sukaraja, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara	511.813.265	PMDN
3.	BAKRIE FOOD AND ENERGY	Jalan Acess Road Inalum Km 15, Desa Lalang Kec. Medang Deras Kabupaten Batu Bara	28.870.375.604	PMDN
4.	BIDADARI MEDIKAL NUSANTARA	JL LINTAS SUMATERA KM 108 DUSUN KLEMBIS ,DESA SUKARAJA, KEC. AIR PUTIH , KAB. BATU BARA	7.845.586.911	PMDN
5.	BIYU IYAS MALELA	Dusun IV, Desa Tanjung Kasau, Kec. Laut Tador, Kab.Batu Bara	101.811.326	PMDN
6.	DAYA INDAH YASA	MR DIY Ruko Sudirman Indrapura Air Putih Batu Bara	12.775.364	PMDN
7.	DOMAS SAWITINTI PERDANA	Jl. Access Road Inalum KM 15, Desa Lalang, Kec. Medang Deras	239.829.999	PMDN
8.	EPID MENARA ASSETCO	Dusun IV Tanjung Permai, Desa Kuala Tanjung, Kec. Sei Suka	21.000.000	PMDN
9.	FLORA SAWITA CHEMINDO	Jalan Acess Road Inalum Km 15, Desa Lalang Kec. Medang Deras Kabupaten Batu Bara	319.134.600	PMDN
10	HONG LIE OLEO CHEMICAL INDONESIA	Dusun I Small Holder, Desa Perjuangan, Kec. Sei Balai, Kab. Batu Bara	40.360.000.000	PMDN
11	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM	Jl. Access Road, Desa Kuala Tanjung, Kec. Sei Suka, Kab. Batu Bara	59.660.901.756	PMDN

12	INSURINDO INTERSERVICES	Dusun IV Tanjung Permai Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara	36.305.000	PMDN
13	JAYA PRATAMA SAWIT	Dusun I No. 8, Desa Perjuangan, Kec. Sei Balai, Kab. Batu Bara	180.000.000	PMDN
14	KARYA PRATAMA NIAGAJAYA	Dusun I Desa Tanjung Seri, Kec. Laut Tador, Kab. Batu Bara	2.138.050.364	PMDN
15	MADJIN CRUMB RUBBER FACTORY	JLN. MESJID LK. VI, Kelurahan Indrapura, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara	246.592.500	PMDN
16	MIDI UTAMA INDONESIA	ALFAMIDI KABUPATEN BATU BARA	386.692.879	PMDN
17	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI	Dusun VI Desa Petatal, Kec. Datuk Tanah Datar, Kab. Batu Bara	43.000.000	PMDN
18	PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA	Desa Perkebunan Dolok, Kec. Lima Puluh, Kab.Batu Bara	30.199.687.914	PMDN
19	PERUSAHAAN PERKEBUNAN, INDUSTRI & DAGANG KWALA GUNUNG	Desa Perkebunan Kwala Gunung, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara	16.010.000	PMDN
20	PRIMA PENGEMBANGAN KAWASAN	Desa Kuala Tanjung, Kec. Sei Suka, Kab. Batu Bara	2.606.775.400	PMDN
21	REZEKI TIGA SERANGKAI	Jalan Lintas Sumatera Km.110 Dusun VI, Desa Simpang Gambus, Kec. Lima Puluh, kab.Batu Bara	35.250.000.000	PMDN
22	SAPTA MANUNGGAL JAYA	Dusun Umar Palangki, Desa Tanah Merah, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara	4.753.488.622	PMDN
23	SARANA INDUSTAMA PERKASA	Jl. Access Road Inalum KM 15, Desa Lalang, Kec. Medang Deras	5.864.321.592	PMDN
24	SARANA PETRO DINAMIKA	Jalan Access Road Inalum Km. 10, Desa Pakam Raya, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara	137.597.302	PMDN
25	SUMATRASARANA SEKARSAKTI	Jl. Smelter Site Acces Road Inalum – Dusun IV Tanjung Permai, Desa Kuala Tanjung., Kec. Sei Suka, Batu Bara	8.424.350	PMDN

26	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Alfamart Kabupaten Batu Bara	2.839.063.766	PMDN
27	SUMBER SAWIT MAKMUR	Desa Laut Tador, Kec. Laut Tador, kab Batu Bara	6.114.102.962	PMDN
28	SUPRA MATRA ABADI	Kec. Datuk Tanah Datar, Kab. Batu Bara	2.064.566.076	PMDN
29	DOMAS AGROINTI PRIMA	JL. ACCESS ROAD INALUM KM 15, DESA LALANG, KEC. MEDANG DERAS, KAB. BATU BARA	27.564.647.102	PMA
30	KALTIMEX MOBIOL INDONESIA	POM BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS DUSUN 7 PERKEBUNAN SEI BALAI, KEC. SEI BALAI, KAB. BATU BARA	4.001.914.197	PMA
31	MULTIMAS NABATI ASAHAN	ACCESS ROAD DUSUN SONO, DESA LALANG, KEC. MEDANG DERAS, KAB. BATU BARA	60.740.500	PMA
32	PETRO ANDALAN NUSANTARA	ACCESS ROAD DUSUN SONO, DESA LALANG , KEC. MEDANG DERAS, KAB. BARU BARA	526.528.297	PMA
33	PRIMA TANGKI INDONESIA	PELABUHAN KUALA TANJUNG, DESA KUALA TANJUNG, KEC. SEI SUKA, KAB. BATU BARA	11.193.547.186	PMA
34	SOCFIN INDONESIA	DESA PERKEBUNAN TANAH GAMBUS,KEC. LIMA PULUH, KAB. BATU BARA	39.333.747.654	PMA
35	TELEKOMUNIKASI SELULAR	JALAN BESAR BULAN-BULAN DUSUN II, KEC. LIMA PULUH PESISIR, KAB. BATU BARA	14.168.638.960	PMA
36	WILMAR PADI INDONESIA	ACCESS ROAD DUSUN SONO, DESA LALANG, KEC. MEDANG DERAS, KAB. BATUBARA	113.541.441.724	PMA
JUMLAH			450.652.895.722	

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

No	Indikator	Satuan	Tahun2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Nilai	85	86,63	101,92

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara melakukan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara melalui aplikasi si Sukma. Tahun 2024 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu 86,63 (kategori baik), dan jika dilihat dari target IKM untuk tahun 2024 yaitu 85, maka persentase yang diperoleh untuk Nilai IKM Tahun 2024, mencapai 101,92%, dengan kategori melebihi target

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Nilai IKM 79,90, maka terdapat peningkatan nilai IKM di tahun 2024. Perbandingan realisasi dan capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut :

No	Indikator	Satuan	Tahun2023			Tahun2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Nilai	87	79,90	91,84	85	86,63	101,92

Pencapaian kinerja persentase nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan didukung dengan adanya pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal, sebagai berikut :

Realisasi Program/Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Persentase
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Program Pelayanan Penanaman Modal	55.800.000	55.800.000	100	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Sesuai SP dan SOP
1.	Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	55.800.000	55.800.000	100	Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan
1)	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Eletronik	55.800.000	55.800.000	100	Pelaku usaha yang memiliki NIB dan Izin
	JUMLAH	55.800.000	55.800.000	100	

Selanjutnya berdasarkan hasil capaian kinerja dan realisasi program/kegiatan penunjang capaian indikator tersebut, maka dapat dihitung analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Adapun Efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap realisasi anggaran program pelayanan penanaman modal, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capain	Anggaran	Realisasi	% Capain	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan	85	86,63	101,92	55.800.000	55.800.000	100	1,01%

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian target kinerja tersebut, yaitu :

1. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2. Menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan melalui mobil pelayanan keliling
3. Melanangani layanan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan

Selain itu yang menjadi kendala atau yang harus ditingkatkan untuk pelayanan perizinan yaitu :

1. Literasi masyarakat terhadap penggunaan layanan perizin
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan perizinan
3. Ketersediaan SDM pada DPMPTSP yang belum memadai

Pelayanan Perizinan dan non perizinan serta perizinan berusaha, dalam hal ini dapat dilihat dari jumlah izin yang terbit :

**JUMLAH IZIN DAN NON IZIN YANG DITERBITKAN
DPMPTSP KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2024**

NO	JENIS IZIN DAN NON IZIN	JUMLAH
1	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)	63
2	IZIN PENGGALIAN JALAN UMUM UNTUK PENANAMAN PIPA, KABEL, DAN SEJENISNYA	0
3	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	0
4	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	0
5	IZIN KLINIK	0
6	IZIN LABORATORIUM KLINIK	0
7	IZIN UNIT PELAYANAN TRANSFUSI DARAH	0
8	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER	83
9	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS	33
10	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI	14
11	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI SPESIALIS	1
12	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN	343
13	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT	179
14	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT	3
15	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER	39
16	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	50
17	SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISIEN	3
18	SURAT IZIN PRAKTIK OPTOMETRIS	0
19	SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS	8
20	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATURUM MEDIK	19
21	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT ANASTESI	1
22	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI	8
23	SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS	0
24	SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTRO MEDIS	2
25	SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS	10
26	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN	6
27	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER	1
28	SURAT IZIN KERJA KESEHATAN MASYARAKAT	3
29	SURAT IZIN TENAGA PENGOBATAN TRADISIONAL	0
30	SURAT IZIN TUKANG GIGI	0
31	IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	24
32	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA	0
33	IZIN KURSUS KETERAMPILAN	0
34	IZIN KELEMBAGAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT	2

NO	JENIS IZIN DAN NON IZIN	JUMLAH
35	IZIN KELEMBAGAAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT	0
36	IZIN OPERASIONAL BIMBINGAN BELAJAR	0
37	IZIN OPERASIONAL RUMAH PINTAR	0
38	IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA	1
39	IZIN SANGGAR SENI	4
40	IZIN TRAYEK	0
41	PERSETUJUAN HASIL ANALISI DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)	0
42	IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN	0
43	IZIN KLINIK HEWAN	0
44	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT HEWAN	0
45	IZIN USAHA PERIKANAN	0
46	IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM	0
47	IZIN REKLAME	41
48	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)	0
49	SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	0
50	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI	0
TOTAL		941

**JUMLAH IZIN BERUSAHA YANG DITERBITKAN OSS
YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2024**

Bulan	Surat Izin yang diterbitkan (NIB)
Januari	186
Februari	96
Maret	3720
April	106
Mei	291
Juni	118
Juli	248
Agustus	209
September	167
Oktober	212
November	115
Desember	139
Total	5607

Peningkatan kualitas pelayanan perizinan juga dapat dilihat dari kinerja substansi pengaduan dalam menyelesaikan masalah yang dilaporkan masyarakat pada tahun 2024. Semua pengaduan dimediasi untuk kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan. Dibawah ini kami tampilkan data pengaduan tahun 2024 yang telah dimediasi dan diselesaikan.

DATA REKAPAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN TAHUN 2024

BULAN	TANGGAL	NAMA PENGADU	JENIS PENGADUAN	YANG DIADUKAN	LOKASI PENGADUAN	PENANGANAN	HASIL
Januari	X	X	X	X	X	X	X
Februari	X	X	X	X	X	X	X
Maret	X	X	X	X	X	X	X
April	X	X	X	X	X	X	X
Mei	X	X	X	X	X	X	X
Juni	X	X	X	X	X	X	X
Juli	03 Juli 2024	Masyarakat LK. II Kampung Nipah	Keberatan terhadap usaha jual beli sotong/kepang	Bapak Junaidi	Kampung Nipah Kel. Labuhan Ruku Kec. Talawi	Pada tanggal 08 Agustus 2024, Katim Pengaduan bersama dengan tim DPMPTSP turun ke lokasi untuk mengecek apakah usaha bapak Junaidi untuk jual beli sotong sudah memiliki izin atau belum	Bapak Junaidi sudah memiliki surat izin dari OSS yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha) pada tanggal 5 Desember 2024, untuk masalah lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara juga sudah turun ke lokasi untuk mengecek limbah mereka
Agustus	06 Agustus 2024	Aliansi masyarakat anti perzinahan desa Antara dan desa Petatal	Permohonan audiensi terkait kegiatan prostitusi di Wisma Bahagia	Wisma Bahagia	Desa Antara Kec. Lima Puluh	Pada tanggal 07 Agustus 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sudah melakukan pertemuan dengan Aliansi Masyarakat Anti Perzinahan desa Antara dan desa Petatal di Aula DPMPTSP Kab. Batu Bara.	Pada pertemuan tersebut diambil kesepakatan bahwa sesuai dengan rapat kesepakatan yang digelar di aula DPMPTSP Kab. Batu Bara pada tanggal 10 Oktober 2024 yang dihadiri oleh Kasatpol PP, Kepala Desa, dan dinas terkait, bahwa jika terjadi kembali praktik prostitusi pasangan yang bukan suami istri serta anak di bawah umur maka sesuai dengan perjanjian wisma Bahagia bersedia ditutup operasionalnya, yang berhak untuk menutup usaha tersebut adalah wewenang Satpol PP Kab. Batu Bara, maka dari itu kami menyarankan kepada Aliansi Masyarakat Anti Perzinahan desa Antara dan desa Petatal silahkan menghubungi Satpol PP untuk segera menutup usaha tersebut.
September	3 Sep 2024	Perwakilan masyarakat desa Tanjung Gading	Masalah izin bangunan dan izin lingkungan	PT. SAS (Sawit Abadi Sentosa)	Desa Tanjung Gading Kec. Sei Suka	Pada tanggal 3 September 2024 Kepala Bidang Perizinan dan Katim Pengaduan DPMPTSP Kab. Batu Bara bertemu langsung	Kepala bidang perizinan menerangkan langsung bahwa perusahaan PT. SAS masih dalam sedang mengurus persetujuan bangunan gedung, dan untuk mengenai izin lingkungan, silakan orang bapak/ibu menanyakan ke dinas lingkungan hidup

						dengan masyarakat desa Tanjung Gading untuk menanyakan terkait izin pembangunan PT. SAS (Sawit Abadi Sentosa)	
	11 Sep 2024	Undangan dari Kel. Tanjung Tiram	Terkait limbah ayam potong	Erwansyah (Pemilik usaha ayam potong)	Jl. Rakyat LK. II Kel. Tanjung Tiram	Ketua tim Pengaduan DPMPSP sudah turun ke lokasi pada tanggal 12 September 2024	Pada tanggal 12 September 2024, Ketua Tim Pengaduan DPMPSP sudah turun ke Kantor Lurah Tanjung Tiram untuk mengadakan musyawarah terkait limbah ayam potong tersebut, dimana pada saat itu hadir warga yang melaporkan, pemilik usaha, Sekretaris Camat Tanjung Tiram, Lurah Tanjung Tiram, Kabid Lingkungan, dan dari dinas Koperasi dan Perdagangan. Pada saat pengusaha memastikan kalau usaha mereka tersebut sudah memiliki surat izin, ternyata setelah dicek belum memiliki surat izin, yang mereka miliki hanya sebatas surat keterangan usaha dari kepala desa, akhirnya diambil suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak yaitu untuk saling berdamai dan menjaga kerukunan, dan bapak Irwansyah langsung mendaftarkan izin usahanya melalui OSS dan izinnya langsung keluar.
		Masyarakat Dsn. IV desa Tanjung Harapan	Keberatan warga	Ternak ayam	Dsn. IV Lengkong desa Tanjung Harapan Kec. Air Putih	Ketua tim Pengaduan DPMPSP sudah turun ke lapangan untuk survei pada tanggal 17 September 2024	Pada tanggal 17 September Ketua tim Pengaduan sudah melakukan survei lapangan dan warga meminta untuk mediasi langsung dilapangan, dan mediasi tersebut membutuhkan hasil kesepakatan antara pengusaha ternak dan warga masyarakat, yang mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh warga masyarakat dengan pengusaha serta diketahui oleh Kadus dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Oktober	X	X	X	X	X	X	X
Nopember	X	X	X	X	X	X	X
Desember	X	X	X	X	X	X	X

Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi

No	Indikator	Satuan	Tahun2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai	71	70,45	99,23

Sasaran strategis 3 ini merupakan integritas dari beberapa unsur yang harus dicapai, yaitu: dengan meningkatkan Kinerja Lembaga melalui ketersediaan sarana dan prasarana, Perencanaan Kinerja dan Keuangan, Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, serta nilai AKIP Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) dari Inspektorat Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 bahwa Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 menunjukkan kategori BB (sangat baiki) dengan nilai sebesar 70,45 (tujuh puluh tiga koma empat puluh lima).

Jika realisasi nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 70,45 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 senilai 71, maka capaian indikator Nilai hasil evaluasi AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 99,23% (tidak mencapai target).

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) yaitu realisasi Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu 70,07, maka terdapat peningkatan nilai AKIP di tahun 2024. Perbandingan realisasi dan capaian nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Batu Bara tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut :

No	Indikator	Satuan	Tahun2023			Tahun2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai	BB (70)	BB (70,07)	100	BB (71)	BB (70,45)	99,23

Pencapaian kinerja persentase nilai evaluasi AKIP Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara didukung dengan adanya pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

Realisasi Program/Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Persentase

Nilai Evaluasi AKIP OPD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARA N (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten Kota	3.439.409.503	3.327.086.040	96,73	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.110.122.951	2.072.070.047	98,20	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.082.603.125	2.045.380.247	98,21	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	27.519.826	26.689.800	96,98	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.000.000	42.320.000	96,18	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	44.000.000	42.320.000	96,18	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	403.183.185	397.901.137	98,69	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah
1)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.988.376	78.718.100	99,66	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.062.702	20.045.950	99,92	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	30.000000	100	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
4)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.132.117	26.885.800	99,09	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.000.000	26.000.000	100	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.000.000	216.251.287	97,85	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.400.000	110.900.000	99,55	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
1)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.200.000	67.200.000	100	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.200.000	43.700.000	98,87	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	520.033.357	494.828.087	95,15	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.996.592	1.960.000	98,17	Tersedianya jasa surat menyurat
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.396.765	106.928.087	83,28	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.400.000	7.400.000	100	Tersedianya jasa peralatan dan Perlengkapan kantor
4)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	382.240.000	378.540.000	99,03	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	250.670.000	209.066.769	83,40	Terpeliharanya Barang Milik Daerah

	Pemerintahan Daerah				
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	133.670.000	130.216.769	97,42	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.000.000	44.750.000	95,21	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000	32.000.000	53,33	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	2.100.000	21	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
	JUMLAH	3.439.409.503	3.327.086.040	96,73	

Selanjutnya berdasarkan hasil capaian kinerja dan realisasi program/kegiatan penunjang capaian indikator tersebut, maka dapat dihitung analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Adapun Efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja persentase nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara terhadap realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capain	Anggaran	Realisasi	% Capain	
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP OPD	71	70,45	99,23	3.439.409.503	3.327.086.040	96,73	0,98%

Kemudian dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran ini pada masa

mendatang, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara perlu melakukan peningkatan cara penyajian laporan kinerja dengan sebaik mungkin mengikuti arahan atau rekomendasi yang diberikan Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara sesuai kaidah penyusunan laporan kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu yang menjadi kendala dalam rangka meningkatkan capaian kinerja nilai AKIP OPD, yaitu ketersediaan SDM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang belum memadai baik dari kuantitas maupun SDM yang berkopetensi.

B. REALISASI ANGGARAN

A. Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara dan realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

No	BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1.	Belanja Pegawai	2.116.443.125	2.079.220.247	98,24
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.209.893.290	2.128.141.843	96,30
3.	Belanja Modal	44.200.000	43.700.000	98,87
JUMLAH		4.370.536.415	4.251.062.090	97,27

Realisasi Anggaran tahun 2024 berdasarkan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Badapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan pada Tahun 2024

Program/ Kegiatan	Target			Realisasi			%
	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	100	Persen	3.439.409.503	100,00	Persen	3.327.086.040	96,73
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	2.110.122.951	100	Persen	2.072.070.047	98,20
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21	Orang/Bulan	2.082.603.125	16	Orang/Bulan	2.045.380.247	98,21
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Laporan	27.519.826	3	Laporan	26.689.800	96,98
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	44.000.000	100	Persen	42.320.000	96,18
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	44.000.000	1	Paket	42.320.000	96,18
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	403.183.195	100	Persen	397.901.137	98,69
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	78.988.376	1	Paket	78.718.100	99,66
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Paket	20.062.702	4	Paket	20.045.950	99,92

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Paket	30.000.000	12	Paket	30.000.000	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Paket	27.132.117	12	Paket	26.885.800	99,09
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40	Dokumen	26.000.000	40	Dokumen	26.000.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	221.000.000	150	Laporan	216.251.287	97,85
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	111.400.000	100	Persen	110.900.000	99,55
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Unit	67.200.000	1	Unit	67.200.000	100,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	Unit	44.200.000	2	Unit	43.700.000	98,87
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	520.033.357	100	Persen	494.828.087	95,15
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	1.996.592	4	Laporan	1.960.000	98,17
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	128.396.765	12	Laporan	106.928.087	83,28
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Laporan	7.400.000	4	Laporan	7.400.000	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	382.240.000	12	Laporan	378.540.000	99,03
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	250.670.000	100	Persen	209.066.769	83,40
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	Unit	133.670.000	2	Unit	130.216.769	97,42
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	Unit	47.000.000	10	Unit	44.750.000	95,21
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	60.000.000	1	Unit	32.000.000	53,33
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	Unit	10.000.000	2	Unit	2.100.000	21,00
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100	Persen	271.222.912	100	Persen	268.672.350	99,06
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	Dokumen	271.222.912	1	Dokumen	268.672.350	99,06
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	Dokumen	271.222.912	1	Dokumen	268.672.350	99,06
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	100	Persen	55.800.000	100,00	Persen	55.800.000	100,00
Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	55.800.000	100	Persen	55.800.000	100,00
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	1250	Pelaku Usaha	55.800.000	5607	Pelaku Usaha	55.800.000	100,00

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	100	Persen	604.104.000	100	Persen	599.503.700	99,24
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	604.104.000	100	Persen	599.503.700	99,24
Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	384	Pelaku Usaha	494.904.000	384	Pelaku Usaha	492.603.700	99,54
Pengawasan Penanaman Modal	28	Kegiatan Usaha	109.200.000	28	Kegiatan Uaha	106.900.000	97,89
Jumlah			4.370.536.415			4.251.062.090	97,27

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk Tahun 2024, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara dibebankan target retribusi sebesar **Rp 1.000.000.000,-** (Satu milyar rupiah) dan retribusi yang dicapai sebesar **Rp 916.049.734,-** (Sembilan ratus enam belas juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah). Realisasi retribusi tersebut berasal dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Persentase Pencapaian PAD terhadap target tersebut sebesar 91,60%.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman untuk merencanakan program dan kegiatan serta pengambilan kebijakan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan perizinan. Secara umum, kinerja yang telah dicapai termasuk dalam kategori sangat baik, Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta perizinan berusaha terus berupaya untuk ditingkatkan, begitu juga dengan sarana dan prasarana, sedangkan untuk SDM/aparatur di DPMPTSP masih kurang memadainya.

2. Langkah-langkah strategis

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun mendatang, perlu dilaksanakan langkah-langkah strategis untuk perbaikan kinerja, antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan prima, melalui :
 - a. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan
 - b. Meningkatnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah sebagai tim teknis maupun lembaga lainnya.
 - c. Tersedianya SDM / aparatur yang handal.
 - d. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan internal.
 - e. Meningkatnya informasi dan publikasi tentang pelayanan publik terhadap pengurusan perizinan kepada masyarakat.
 - f. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
2. Meningkatkan kualitas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, melalui:
 - a. Terciptanya daya saing daerah.
 - b. Adanya integrasi pelayanan baik antar propinsi, kabupaten/kota, dinas maupun antar lembaga dan pihak terkait.
3. Meningkatkan pelayanan secara elektronik.
 - a. Adanya akses yang lebih luas kepada masyarakat.
 - b. Terciptanya sub-sistem pelayanan informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan serta adanya sub-sistem pendukung.
 - c. Adanya pemberian hak akses kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, petugas pelayanan, pemohon dan pegawai instansi lain sesuai dengan kewenangan.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2024 ini kami susun, demi perbaikan kinerja ditahun mendatang. Sekian dan terima kasih.

Lima Puluh, 31 Januari 2025



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

Dr. MEI LINDA SURYANTI LUBIS, S.STP, M.AP
PEMBINA TK. I/IV.B
NIP. 198705262006022002